

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prakarsa Yuristama, Udin Saripudin,” Mewujudkan etika dalam kegiatan perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dalam <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>, diakses 30 September 2023
- Agustin, H., & Purba, I. P. M. H. (2023). Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 295-314.
- Arifin, A. (2017). Analisis proses perencanaan penganggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Morowali). *Katalogis*, 5(12).
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Prodamas dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 270-277.
- Dewi, T.S. (2018). *Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan Loen Kota Bandung* (Doctoral dissertation, perpustakaan).
- Firmansyah, A., Ak, M., Estutik, R. S., & Ak, S. T. (2021). *Kajian akuntansi keuangan: Peran tata kelola perusahaan dalam kinerja tanggung jawab lingkungan, pengungkapan tanggung jawab sosial, agresivitas pajak*. Penerbit Adab.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39-53.
- Haerena dan Burhanudin, 2022. *Manajemen Pelayanan publik*. Jakarta:Widina Bhakti Persada Bandung

- Harahap, R. H. (2018). Implementasi Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Pontianak. *MaksiI Untan*, 4(1).
- Iskandar, E. (2018). Peranan Akuntansi dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Negara Ditinjau dari Akuntabilitas, Transparansi dan Teknologi. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Julfani, L., & Putra, I. M. (2024). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 591-608.
- Juriah, J., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Accountability for the Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program in an Effort to Improve Community Welfare (Case Study in the Mandailing Natal District Social Service Office. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 2(2), 413-420.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Kamila, H. K. P. F. *Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Krina, Loina Lalolo. 10 Juni 2024. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, hal.9

- Kosasih, A. (2018, September). Pendekatan grounded teori (*grounded theory approach*) sebuah kajian sejarah, teori, prinsip dan strategi metodenya. *In Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018*.
- Mufazzal, M., & Abidin, Z. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 406-427.
- Oktarina, E., & Sari Nilam Cayo, P. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum. Jakarta: Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. *QISTIE*, 11(2).
- Rahmawati, F., & Ahzar, F. A. (2020). *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Ridwan, A. F. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Tahun 2018 (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Rohmah, Y. A. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 1-9.
- Sediana Milasari D, Agnes. 2020. "Pogram Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya", dalam Prgram Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya (kemenkeu.go.id), diakses 23 September 2023.
- Serta, T. D. A. P. Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi

- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63.
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63.
- Wahyudi, N. (2018). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dala Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang.
- Wahyuni, R., & Susilawati, N. (2022). Pendampingan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Nagari Silayang Kabupaten Pasaman. *Jurnal Perspektif*, 5(4), 602-611.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2).
- Wulandari, A. (2010). Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance. *InFestasi*, 6(2), 95-110.